BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Profil Tempat Kerja Praktek

2.1.1 Sejarah Instansi

Diawali pada Zaman Hindia Belanda sampai tahun 1942, Depdagri disebut Departement van Binnenlands Bestuur yang bidang tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi, dan Agraria. Selanjutnya pada Zaman pendudukan Jepang (tahun 1942-1945).

Departement vang Binnenland Bestuur oleh pemerintah Jepang diubah menjadi Naimubu yang bidang tugasnya meliputi juga urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Naimubu atau Kementrian Dalam Negeri berkantor di Jalan Sagara nomor 7 Jakarta sampai Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 Naimubu dipecah menjadi:

a. Kementrian Dalam Negeri termasuk urusan agama, yang dalam perkembangan lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari Kementrian Dalam Negeri.

b. Kementrian Sosial

c. Kementrian Kesehatan.

d. Kementrian Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.

Kementrian Dalam Negeri yang dibentuk pada saat Kabinet Presidensial yang pertama Negara Republik Indonesia pada tahun 1945.

Dan sejak berdirinya yang bermula dari Kabinet Presidensial sampai dengan Kabinet Gotong Royong sudah sering berganti beberapa menteri yang memegang Jabatan di Kementerian Dalam Negeri.

2.1.2 Logo instasi

Arti Logo/Lambang

Berdasar Permendagri Nomor 1 Tahun 1991Pegawai

Negeri Sipil di lingkungan Kemendagri diharapkan dapat menjadi Aparatur yang bersih dan berwibawa selalu memegang teguh Sapta Prasetya Korpri setia dan taat kepada Pancasila. UUD 1945 Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17-8-1945 dengan dasar Negara Pancasila dan bertekad untuk mempertahankan kejayaan serta mengisi Kemerdekaan dengan meningkatkan kemakmuran Bangsa guna mencapai Masyarakat Adil dan Makmur

Keterangan :

a. Kapas dan daun = 17 buah
b. Akar gantung beringin 8 buah (4 kiri dan 4 kanan)
c. Butir padi 45 buah
d. Akar beringin 5 cabang
e. Gerumbulan 27 buah
f. Daun Padi 27 buah

Warna Arti Warna

Dasar logo : Biru Tua Biru tua artinya kesetiaan
Kapas : Putih Putih aartinya suci
Bulir padi & daun : Kuning emas Kuning emas artinya kejayaan
Pita : Kuning emas Hijau artinya kemakmuran/kesuburan
Tulisan : Putih

2.1.3 Badan hukum instansi

Pusat pendidikan dan pelatihan kementrian dalam negeri regional bandung adalah unit pelaksana teknis (UPT) pendidikan dan pelatihan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri dalam negeri , secara teknis dibina oleh badan pendidikan dan pelatihan kementrian dalam negeri yang

dibentuk berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri dan otonomi daerah No 29 tahun 2001 tanggal 20 juli 2001. Bertempat di jalan sukajadi No 185 Bandung.

2.1.4 Struktur Organisasi dan Job description

Struktur organisasi dan tata kerja Pusdiklat Regional Bandung sebagaimana diatur dalam Keputusan Mentri Dalam Negri nomor 29 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Dalam Negri Nomor 27 Tahun 2000 tentang organisasi dan tata kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional Bandung.

Selanjutnya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional Bandung adalah unit pelaksana teknis pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementrian Dalam Negri yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Mentri Dalam Negri dan secara teknis fungsional dibina oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan yang berpusat di jakarta. Mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

1. Kantor Pusat Kementrian Dalam Negri
2. Provinsi Lampung
3. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Provinsi Jawa Barat
5. Provinsi Banten
6. Provinsi Kalimantan Barat
7. Provinsi Kalimantan Tengah
8. Provinsi Kalimantan Selatan

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional Bandung terdiri dari :

1. Kepala dengan eselonering II/b
2. Bagian Tata Usaha dengan eselonering III/b serta membawahi
   a. Sub Bagian Program dengan eselonering IV/b
   b. Sub Bagian Keuangan dengan eselonering IV/b
   c. Sub Bagian Administrasi dan Umum dengan eselonering IV/b
   d. Sub Bagian Perpustakaan dengan eselonering IV/b
3. Bidang Diklat Teknis Fungsional dengan eselonering III/b dan membawahi :
   a. Seksi Analisis Kurikulum Silabi dan Metode Diklat eselonering IV/b
   b. Seksi Pelaksanaan dengan eselonering IV/b
   c. Seksi Evaluasi Data dan Alumni dengan eselonering IV/b
4. Bidang Diklat Strukturan dengan eselonering III/b dan membawahi :
   a. Seksi Analisis Kurikulum Silabi dan Metode Diklat eselonering IV/b
   b. Seksi Pelaksanaan dengan eselonering IV/b

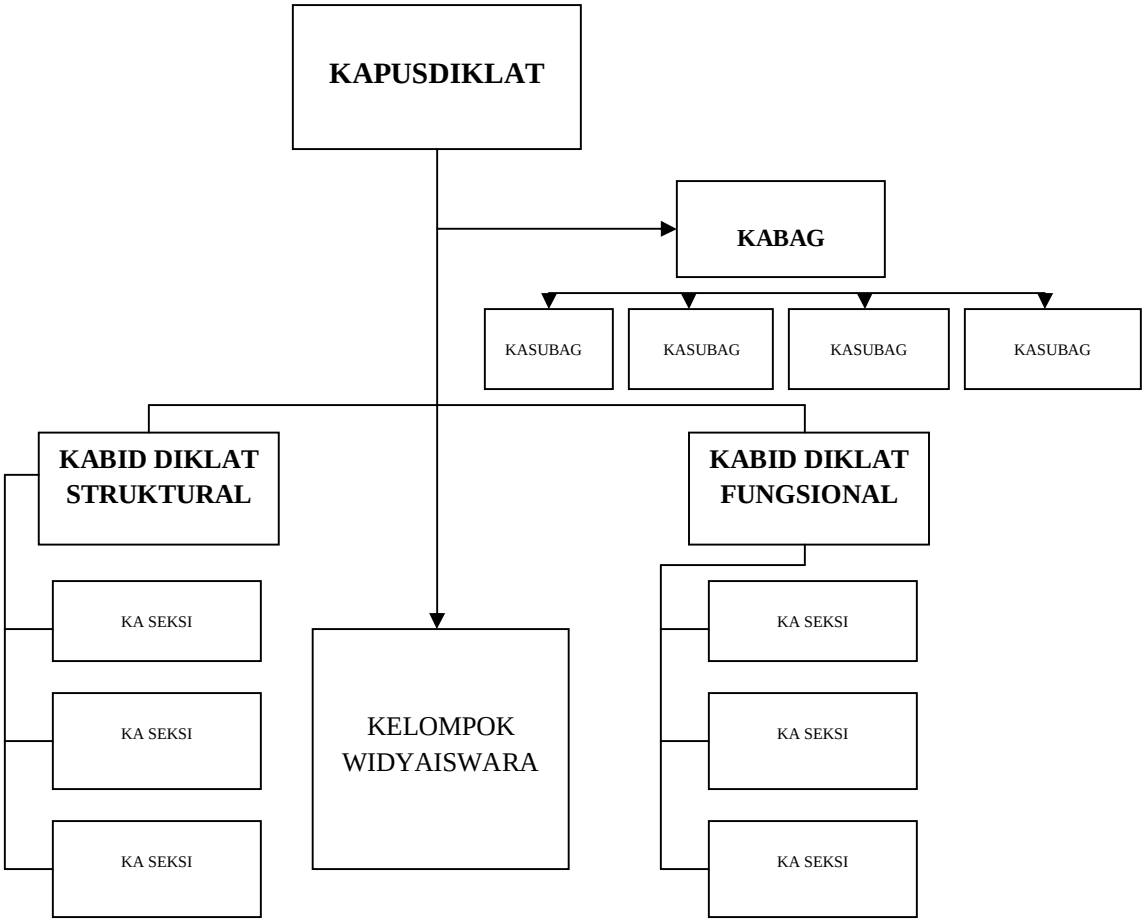
c. Seksi Evaluasi Data dan Alumni dengan eselonering IV/b

5. Kelompok Tenaga Fungsional

Untuk lebih jelasnya Struktur Pusat Pendidikan Pelatihan Regional Bandung dapat dilihan pada gambar sebagai berikut :

Gambar 1

Struktur Pusdiklat Regional Bandung



Sumber : STOK Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2001

Secara Operasional tugas dan Fungsi Pusdiklat Kementrian Dalam Negri Regional Bandung tidak berjalan Optimal, hal mana disebabkan antara lain :

A. Struktur Organisasi tidak mencerminkan struktur suatu institusi yang berkendudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pendidikan dan Pelatihan,

akan tetapi lebih mencerminkan sebagai struktur instansi pembuatan kebijakan. Oleh karena itu beberapa unit organisasi tidak dapat optimal, diantaranya fungsi analisis kurikulum.

B. Sejak Pelaksanaan Otonomi Daerah penyelenggara diklat aparatur dapat dilaksanakan oleh berbagai instasi, baik ditingkat pusat maupun pada tingkat Daerah, hal mana menempatkanketidak jelasan dan ketegasan penyelenggaraan Diklat Aparatur kewenangan instansi mana. Sebagai akibat dari kondisi itu terbangun persaingan yang kurang sehat di antara lembaga diklat maupun peserta diklat.

Ditengah persaingan yang ketat tersebut selama periode januari 2007 sampai dengan agustus 2010 Diklat yang dapat diselenggarakan, baik teknis Fungsional maupun Struktural selama ini dapat dilihat sebagaimana dalam lampiran memori ini.

Hal-hal yang terkait dengan Wilayah kerja Pusdiklat Kementrian Dalam Negri Regional Bandung sudah tidak dapat dijadikan dasar kebijakan dalam merekrut peserta dari berbagai daerah di seluruh Indonesia sangat tergantung dengan pilihan daerah tersebut dilandasi oleh beberapa hal antara lain efisiensi kualitas penyelenggaraan dan mutu kelurahan/alumni.

Dalam rangka tertib administrasi kedinasan, Pusdiklat Regional Bandung menerapkan Tata Naskah Dinas sesuai ketentuan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementrian Dalam Negri sehingga segala hal yang terkait dengan administrasi surat menyurat dapat berjalan efektif.

Sarana dan prasarana kerja yang saat ini digunakan di Pusdiklat Regional Bandung belum memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja yang memadai, sehingga sangat perlu ditingkatkan dalam rangka optimalisasi kinerja dan peningkatan produktivitas kerja pegawai.